



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

ISSN: 2527 - 6344 (Print)

ISSN: 2580 - 5800 (Online)

Website: Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>

Volume 6, No. 1, 2021 (279-285)

PERAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Rusman

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Pendekatan interdisipliner dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia sekarang ini menjadi sebuah kebutuhan. Terlebih, dalam konteks upaya meningkatkan perkembangan ekonomi bangsa yang pada praktiknya masih jauh dari nilai-nilai Ketuhanan. Selama ini PAI seakan-akan hanya terfokus pada masalah pendidikan, padahal seorang pendidik pada masa ini memiliki tantangan yang berbeda. Tantangan yang jauh lebih besar dari hari kemarin, sehingga seorang pendidik PAI harus punya wawasan yang luas. Salah satu yang terpenting merupakan tantangan yang menimpa sistem perekonomian umat Islam di bangsa ini. Di mana, praktik-praktik riba, penyelewengan, kecurangan, dan sekulerisasi pada bidang ekonomi masih kental dilakukan umat Islam sendiri. Hal inilah yang menjadi tugas berat PAI untuk membentuk masyarakat Islam yang kelak mampu membuat sistem ekonomi yang Islami. Bagaimanapun, PAI sebagai salah satu wadah “kaderisasi” umat Islam berperan penting dalam pengembangan ekonomi berbasis syari’ah. Mengingat, selama ini PAI dituding “membiarkan” dan “memaafkan” begitu saja generasi Islam melakukan tindakan ekonomi yang sebenarnya di luar kaidah Islam. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba menawarkan jawaban atas skeptisme dan pesimisme terhadap PAI tersebut. Salah satu bahasannya adalah terkait peran PAI dalam mengembangkan ekonomi umat Islam melalui pendekatan syari’ah.

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, Pengembangan, Ekonomi Islam

Pendahuluan

Meninjau kenyataan itu, bisa dikatakan bahwa secara praktis kondisi sistem (infrastruktur, aturan, para pelaku, teknologi, barang, dan sebagainya) ekonomi negara kita masih belum mengarah pada nilai-nilai Ketuhanan. Di mana, kegiatan ekonominya masih belum “melindungi” kepentingan rakyat kecil. Terbukti, masih banyak rakyat miskin yang masih tetap miskin hingga anak keturunannya tak bisa menikmati kebutuhan pokok dengan layak dan bermutu. Masalah lain ialah terjadinya kerendahan moral pada generasi muda bangsa Indonesia demi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Yakni, mereka rela “menjual diri” via internet (prostitusi online). Salah satu varian “perdagangan” manusia itu menunjukkan bahwa pendidikan bangsa kita (utamanya pendidikan agama Islam) telah gagal mendidik generasi muda untuk memahami bagaimana cara “berekonomi” yang baik.

Ketidakadilan ekonomi seperti di atas merupakan gambaran kecil dari keadaan perekonomian bangsa kita. Hal inilah yang menuntut peran pendidikan agar bisa mengeluarkan keterpurukan moral-ekonomi generasi muda. Salah satunya, melalui PAI diharapkan bisa berperan dalam membentuk generasi muda yang memiliki akhlak yang baik dalam menyukkseskan kegiatan ekonomi yang di usahakan. Selain memberikan nilai-nilai keislaman dalam berekonomi, PAI sepatutnya juga bisa memberikan kontribusi secara nyata. Misalnya, para peserta didik (utamanya yang dari ekonomi rendah) didorong untuk mengembangkan diri dalam mengembangkan tingkat derajat ekonominya melalui kegiatan ekonomi yang diadakan oleh lembaga pendidikan.

Selama ini pendidikan Islam hanya difokuskan sebagai penjaga moralitas dan ketaatan beragama umat. Keterlibatan pendidikan Islam dalam pengembangan ekonomi umat, baik secara langsung maupun tidak langsung, belum dapat dirasakan. Bahkan, tak jarang fungsi lembaga pendidikan Islam hanya sebagai “agen” penyalur ijazah untuk mencari kerja, mendapat prestise, hingga untuk meneruskan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Bisa dikatakan, posisi lembaga pendidikan Islam teralienasi dengan kehidupan masyarakat sekitar. Hubungan dengan masyarakat tak lebih dari hubungan transaksional, sehingga kepekaan lembaga pendidikan Islam untuk mensejahterakan umat Islam di sekitarnya tidak dimunculkan. Alih-alih untuk mensejahterakan masyarakat, untuk mensejahterakan diri sendiri saja lembaga pendidikan masih kesulitan.

Menurut Turner sebagaimana dikutip oleh Imam Suprayogo menjelaskan bahwa agama punya fungsi kontrol sosial dan penciptaan kohesifitas (kesatupaduan) sosial. Termasuk di dalamnya ialah terkait distribusi pengendalian harta kekayaan (ekonomi). Di sinilah peran tokoh agama –dalam konteks Islam ialah Kiai—memiliki peran penting. Di mana, sebagian besar



Kyai oleh umatnya secara normatif dipandang sebagai pewaris misi para nabi. Ia dianggap sebagai pemimpin umat dalam segala bidang kehidupan, tak terkecuali masalah ekonomi yang menjadi masalah pelik dan mendasar. Namun, kenyataannya peran Kyai yang paling menonjol selama ini masih terbatas pada kegiatan pendidikan Islam (pesantrean, madrasah, dan sekolah), pembangunan tempat ibada (majsid/mushola), dakwah (mubaligh), dan adakalanya kut pergulatan politik (lokal maupun nasional). Bisa dikatakan, dalam bidang pengembangan ekonomi keterlibatan kyai terkesan kurang menonjol.^[1]

Dari semua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam bidang ekonomi, terutama ekonomi syari'ah masih perlu digalakan lagi. Mengingat, selama ini kepentingan ekonomi masyarakat kecil di sekitar lembaga pendidikan Islam masih belum begitu diperhatikan. Bahkan, seakan-akan dipinggirkan bahkan bisa dikatakan dihambat agar tidak terjadi peningkatan. Khawatirnya, kalau terjadi peningkatan ekonomi pada mereka akan menyebabkan "perubahan" sosial yang merugikan lembaga pendidikan.^[2] Misalnya, mereka tidak akan mau lagi menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan Islam karena taraf hidupnya sudah tinggi sehingga anaknya disekolahkan di sekolah favorit yang lokasinya jauh dari rumahnya. Padahal, salah satu bentuk ketakutan seperti itu sungguh tidak beralasan. Bukankah tujuan pendidikan itu salah satunya ialah untuk merubah keadaan dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi bagi PAI supaya juga memfokuskan mengembangkan diri dalam bidang pemberdayaan ekonomi umat yang akan dibahas tuntas dalam tulisan ini.

Urgensi Pengembangan PAI dalam Bidang Pemberdayaan Ekonomi Islam

Islam merupakan agama yang setiap ajaran-ajarannya bersumber pada al Qur'an dan Hadis. Di mana, sejak awal menyebarnya telah menjunjung revolusi di bidang pendidikan dan pengajaran. Hal ini tidak lain sebagai langkah strategis dalam mengangkat martabat dan derajat kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan jembatan penyeberangan manusia dari keterbelakangan menuju kemajuan, dari kehinaan menuju kemuliaan, dan dari ketertindasan menjadi merdeka.^[22] Tentunya, suatu martabat dan derajat seperti itu tidak harus diperoleh tidak hanya di akhirat saja akan tetapi juga di dunia. Oleh karena itu, pendidikan Islam juga harus mengarahkan peserta didiknya pada hal-hal aspek kejayaan dunia. Salah satu yang bisa ditempuh ialah dengan internalisasi pendidikan ekonomi berbasis syari'ah secara praktis dan teoritis kepada peserta didiknya.

Ajaran Islam pun telah mengajarkan bahwa terlalu lama-lama berzikir (membaca bacaan menyebut nama Allah SWT) di Masjid sehingga

mengakibatkan terlantarnya keluarga malah dianggap sebagai perbuatan dosa. Pesan-pesan lain selain itu yang bisa dijadikan sebagai sumber motivasi dalam pengembangan lain tersedia banyak dalam al Quran dan Hadis. Akan tetapi, pada kenyataannya anjuran tersebut hanya ramai pada tatataraan teoritis (konsep), belum terbukti nyata secara praktik di segala aspek kehidupan, bahkan di lingkungan pesantren dan di kalangan Kiai sekalipun.[23] Bahkan pernyataan Suprayogo yang lebih ekstrim ialah:

“dalam pengembangan aspek ekonomi umat, kyai kelihatan pasif. Kalaupun mereka melakukan kegiatan ekonomi hanya terbatas dalam memobilisasi zakat, infak dan sadakah. Pertanyaan yang layak diajukan ialah apakah kyai tidak mampu menggerakkan ekonomi umat? Kemampuan para kyai dalam politik dan juga pengembangan pendidikan yang ternyata selama ini cukup piawai maka tidak beralasan jika dikatakan bahwa elite agama ini tidak berpotensi pada pengembangan ekonomi umat. Jika demikian, mengapa kyai tampak lembah dalam memikirkan ekonomi umat tersebut. Kyai sebagai pembawa misi Islam (dakwah), semestinya sudah saatnya melihat betapa dakwah itu amat efektif jika disampaikan melalui pendekatan ekonomi.”[24]

Islam sesungguhnya menghargai harta benda dan setiap umat Islam harus memilikinya. Terbukti Allah memerintahkan setiap muslim untuk berzakat, berinfaq, bersedekah, hibah, wakaf, menolong orang lain, dan sebagainya yang berimplikasi bahwa umat Islam harus memiliki harta untuk bisa memenuhi perintah itu. Dengan demikian, mencari harta hukumnya adalah wajib karena harta tidak akan bisa terkumpul tanpa melalui bekerja.[25] Di sinilah sesungguhnya peran pendidikan Islam untuk menanamkan nilai-nilai ekonomi Islam kepada setiap individu peserta didiknya. Agar mereka semua kelak menjadi manusia yang memiliki kekuatan ekonomi mandiri, kuat, dan menjadi teladan minimal dalam lingkup keluarganya sendiri.

Paradigma Pengembangan Pendidikan Agama Islam dalam Bidang Ekonomi Islam

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki landasan filosofis, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, pengembangan PAI baik dalam bentuk materi studi/kajian maupun lembaga pendidikan harus berlandaskan keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, realitas pada umumnya menunjukkan lain. Yakni, masalah keimanan yang tidak terinternalisasikan dengan baik sehingga mampu menjadi inti (core values) dalam pengembangan tersebut. Dampaknya fatal sekali, di antaranya lulusan lembaga pendidikan tidak mempunyai keimanan yang kuat. Pada gilirannya terdapat krisis multidimensional (terutama krisis moral atau akhlak) sebagaimana keadaan bangsa kita saat ini. Maraknya pendidikan sekuler (kebarat-baratan), kemiskinan merajalela,



lembaga pendidikan yang “menuhankan” simbol (nama, gelar, pakaian, seremonial, dan sebagainya), praktik nepotisme, penyuapan, korupsi, kecurangan dalam praktik ekonomi, dan sebagainya itu semua menunjukkan rendahnya kualitas keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.[26]

Hal itu menunjukkan atas kurang pedulinya para cendekiawan dan pengembang PAI untuk menemukan solusi dari permasalahan dan tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Utamanya, menyangkut lemahnya sistem pendidikan Islam yang produknya belum banyak berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi Syari’ah pada era globalisasi ini. Di mana, perkembangan ekonomi (khususnya nasional) hingga saat ini masih didominasi oleh para ahli dan praktisi ekonomi “umum” yang notabene jauh dari ajaran dan nilai-nilai Islam. Adapun, pendidikan Islam dari segi keilmuan dan pengembangannya lebih banyak pada posisi terpinggirkan. Bahkan, dalam masalah ini hanya berkedudukan sebagai konsumen.

Sungguh pun demikian, bukan berarti pengembangan PAI bisa dilakukan secara serampangan. Yakni, mengadopsi segala yang dari “luar” tanpa diseleksi secara cermat. Bagaimanapun, PAI (khususnya di Indonesia) dihadapkan pada permasalahan dan kenyataan yang kompleks. Di antaranya persoalan normatif-ideologi, perbedaan kondisi alam, ekonomi, sosio-kultur, dan kesiapan semua pihak terutama masyarakat dalam menghadapi perubahan-perubahan. Bisa dikatakan, “pengembangan sistem pendidikan Islam akan banyak menyentuh dimensi-dimensi normatif-ideologis, filosofis, psikologis, sosiologis, historis, kultural, ekonomi, dan bahkan kebijakan politik.”[27]

Dari semua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa paradigma pengembangan PAI dalam bidang ekonomi syari’ah harus jelas. Di mana, salah satu tujuannya ialah bagaimana agar produk (peserta didik hasil didikan) PAI harus berkomitmen terhadap segala kegiatan ekonomi yang berbasis Islam. Sebagaimana penjelasan Chapra terkait tujuan ekonomis Islam yang dikutip oleh Fadllan sebagai berikut:

Tujuan ekonomi Islam, menurut M. Umer Chapra, sejalan dengan tujuan pokok Islam yaitu menciptakan kesejahteraan bagi semua umat manusia. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan, yang hal ini dapat diperoleh melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas individu. Pemenuhan kebutuhan rohani membutuhkan pembangunan moral dan pemenuhan kebutuhan materi dapat direalisasikan dengan pembangunan umat manusia dan sumber daya yang ada dalam suatu pola yang merata sehingga semua kebutuhan manusia, dapat dipenuhi secara utuh dan terwujud suatu distribusi kekayaan yang adil dan merata.[28]

Dari penjelasan itu dapat diartikan bahwa tujuan PAI sangat berat. Terlebih lagi menyangkut masalah “keadaan” peserta didik terkait kegiatan perekonomian yang kelak ia lakukan. Mereka dituntut untuk benar-benar meninggalkan kegiatan yang tidak sesuai dengan kaidah Islam. Serta menjalankan sepenuhnya perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kesimpulan

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam pasti semuanya tak boleh dipisahkan dari aturan-aturan agama. Begitu pula dalam bidang ekonomi, seharusnya umat Islam tidak boleh memisahkan antara kegiatan ekonomi sebagai ritual dengan kegiatan ekonomi sebagai kebutuhan hidup. Dengan demikian, cukup jelas bahwa ekonomi Islam bukanlah sekedar wacana moral. Namun, lebih dari itu berdasarkan fakta sejarah ekonomi Islam pernah berjaya di masa lalu (awal datangnya Islam hingga Abad Pertengahan). Hal inilah yang mengharuskan setiap praktisi dan pengonsep Pendidikan Islam untuk “menyadarkan” peserta didik bahwa kegiatan ekonomi itu juga menjadi penentu kesuksesan manusia di dunia hingga akhirat.

Pengembangan umat Islam agar menjadi lebih baik merupakan tanggung jawab seluruh umat Islam itu sendiri. Tak terkecuali dalam bidang pengembangan ekonomi. Dengan ekonomi yang kuat, maka umat Islam akan mampu merubah masyarakat dan bangsa dari kelemahan sehingga menjadi bangsa yang kuat dan mampu berdaya saing. Namun demikian, sekali lagi yang perlu ditekankan ialah tujuannya bukan hanya sekedar pengembangan kuantitas tapi juga pengembangan kualitas perekonomian bangsa. Terlebih saat ini merupakan masa globalisasi, di mana kualitas menjadi lebih diutamakan daripada kuantitas.

Tak terkecuali ialah globalisasi ekonomi. Di mana, globalisasi ekonomi berarti pengurangan hambatan secara bertahap pada transaksi perdagangan barang maupun jasa, pergerakan manusia, dan investasi antar negara sampai terhapus dalam jangk waktu tertentu. Asumsinya, beberapa negara di dunia yang tergantung pada negara lain –sebagai imbas globalisasi— telah mendorong mereka untuk bergabung dalam blok-blok ekonomi. Kenyataan ini merupakan pengaruh “tekanan” politik ekonomi dunia. Di mana, negara yang tidak tergabung dalam salah satu blok tersebut akan cenderung mengalami kesulitan. Baik dalam bidang kebijakan maupun pengembangan ekonominya.

Daftar Pustaka

- Amin, A. Rifqi. Pengembangan Pendidikan Agama Islam: Reinterpretasi Berbasis Interdisipliner. Yogyakarta: LKiS, 2015.
- , Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum. Yogyakarta: Deepublish, 2014.



Departemen Agama. Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru. Surabaya: Duta Ilmu, 2005.

